

Pendekatan Kolaboratif dalam Pencegahan Calon Pekerja Migran Non-Prosedural Indonesia

**Annisa Paramita Wiharani^{1*}, Kishino Bawono², Albert Triwibowo³, Dyah Ayunda⁴,
Yulia Indrawati Sari⁵, Elisabeth A. S. Dewi⁶**

¹⁻⁶ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Jl.
Ciumbuleuit No.94

*Korespondensi: annisa.wiharani@unpar.ac.id

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun pengelolaan yang tidak optimal menimbulkan masalah serius. Menurut BP2MI, sebagian besar masalah PMI disebabkan oleh migrasi non-prosedural. Sukabumi, Jawa Barat, menjadi salah satu wilayah dengan masalah PMI non-prosedural tinggi. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat desa di Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi, untuk meningkatkan kesadaran tentang migrasi aman. Kegiatan mencakup sosialisasi dan diskusi interaktif dengan calon PMI, keluarga, dan tokoh masyarakat. Program ini menargetkan kelompok berpendapatan menengah ke bawah dan melibatkan perempuan serta laki-laki yang berpotensi menjadi PMI non-prosedural. Tema yang dibahas meliputi informasi PMI, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perekrut bertanggung jawab, SBMI, dan pelaporan masalah PMI. Hasilnya termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, dukungan aparat desa, serta penerapan model kerja sama antar lembaga untuk keberlanjutan program. Mitra utama, yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kab. Sukabumi, Yayasan AKATIGA, dan International Organization for Migration (IOM) Indonesia. SBMI akan berkolaborasi dengan tim pelaksana untuk memfasilitasi para peserta, yaitu calon PMI, pasangan/keluarga calon PMI, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama; serta berkoordinasi dengan tim pelaksana untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan lokal. Yayasan AKATIGA akan berkolaborasi dengan tim pelaksana dalam hal riset, identifikasi dan pemetaan isu, serta membantu pendalaman materi sosialisasi. Terakhir, IOM Indonesia akan berkolaborasi dengan tim pelaksana untuk pendalaman materi sosialisasi yang mengacu pada pedoman (modul) terkait migrasi aman serta berkoordinasi dengan tim pelaksana untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan terkait.

Keywords: *Pekerja Migran Indonesia, migrasi aman, kabupaten Sukabumi.*

1. PENDAHULUAN

Pekerja migran masih menjadi salah satu sektor besar secara ekonomi dan demografi Indonesia. Pada 2023, Bank Indonesia merilis bahwa remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 227 triliun rupiah.¹ Dari sisi angka PMI, hingga awal Januari 2025, BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) mencatat bahwa ada 5.210.103 WNI yang merupakan pekerja migran (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024a). Dari angka tersebut, Jawa Barat adalah provinsi terbesar kedua dalam hal kontribusi jumlah PMI setelah Jawa Timur dan sebelum Jawa Tengah. Masih dari data yang sama, beberapa kabupaten/kota perlu di-highlight karena kontribusinya dalam angka PMI. Beberapa wilayah di Jawa Barat yang jumlah PMI-nya besar adalah Indramayu (322.369), Kab. Cirebon (180.952), Subang (116.672), Cianjur (96.575), Karawang (90.092), dan Kab. Sukabumi (68.574)²

Di sisi lain, besarnya remitansi dan angka PMI Indonesia masih menyisakan masalah lain: permasalahan dalam proses kerja di luar negeri. Sebagai gambaran, beberapa masalah yang umum dihadapi adalah jam kerja panjang, rendahnya upah/gaji, keamanan kerja minim, kondisi tinggal yang tidak layak, ketiadaan jaminan hukum, serta ketiadaan sistem pendukung.³ Selain itu, berdasarkan data dari United Nations Global Compact menyatakan bahwa ada beberapa masalah umum yang kerap dihadapi para pekerja migran: rekrutmen yang tidak adil, tindak perdagangan manusia, akses hak pekerja yang tidak merata, serta rasisme dan diskriminasi.⁴ Dari data BP2MI, disebutkan bahwa total ada 48.299 aduan yang dicatatkan oleh Pemerintah Indonesia dari PMI yang tersebar di berbagai negara. BP2MI mengkategorisasikan 3 wilayah penempatan PMI dan wilayah Eropa dan Timur-Tengah menjadi tempat dengan aduan terbanyak (25.228), disusul Asia dan Afrika (22.103), serta Amerika dan Pasifik (697). Di level negara, Arab Saudi (15.318 aduan), Malaysia, (11.551 aduan), Taiwan (4.062 aduan), UEA (3.116), dan Hong Kong (1.732 aduan) merupakan lima wilayah dengan aduan yang tertinggi. Terkait asal wilayah PMI yang melaporkan aduan, BP2MI (2024a) mencatat bahwa Jawa Barat (17.387 aduan), Jawa Tengah (5.262 aduan), dan Nusa Tenggara Barat (5.014 aduan). Dari berbagai aduan yang dicatat oleh BP2MI untuk data seluruh PMI, beberapa jenis

¹ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.2024b. *Kepala BP2MI: Sumbangan Devisa dari Pekerja Migran Indonesia Meningkat Pesat*. Government Agency Website. BP2MI. 20 Juni 2024. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-sumbangan-devisa-dari-pekerja-migran-indonesia-meningkat-pesat>.

² Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024a. *Dashboard Statistik Pekerja Migran Indonesia*. Statistik Pekerja Migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>.

³ Yonas Berhané. 2024. *Enhancing Social Protection for Migrant Workers: Challenges and Strategies in the East and Horn of Africa* | International Labour Organization. International Organization. <https://www.ilo.org/resource/article/enhancing-social-protection-migrant-workers-challenges-and-strategies-east>.

⁴ UN Global Compact. n.d. "Migrant Workers • Business & Human Rights Navigator." International Organization. *Business & Human Rights Navigator* (blog). Diakses tanggal 8 Januari 2025. <https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/issues/migrant-workers/>.

masalah yang ditemui oleh PMI di antaranya: ingin dipulangkan (7.266 kasus), gaji tidak dibayarkan (6.189 kasus), meninggal di negara tujuan, putus hubungan komunikasi (3.765 keluhan), pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja (2.464 kasus), dan lainnya.

Sebanyak 82,6% permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI) berasal dari PMI non-prosedural.⁵ Tingginya angka ini menunjukkan bahwa PMI yang berangkat tanpa mengikuti prosedur resmi lebih rentan menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari ketidakjelasan status hukum, eksploitasi tenaga kerja, hingga kesulitan dalam mengakses perlindungan dan bantuan dari pemerintah. Tanpa dokumen yang sah, PMI non-prosedural kerap mengalami kondisi kerja yang tidak layak, upah yang tidak dibayarkan, serta risiko lebih tinggi terhadap perdagangan manusia. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan PMI itu sendiri, tetapi juga berimbas pada keluarga mereka di tanah air yang bergantung pada remitansi. Oleh karena itu, penanganan permasalahan PMI non-prosedural menjadi aspek krusial dalam upaya perlindungan pekerja migran, sekaligus menjadi dasar bagi berbagai inisiatif pengabdian yang bertujuan meningkatkan kesadaran, akses informasi, dan advokasi bagi calon pekerja migran agar dapat berangkat secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. PMI non-prosedural merupakan PMI yang dikirim melalui cara dan oknum yang tidak sesuai dengan syarat yang berlaku. PMI non-prosedural biasanya dikirim melalui agen atau sindikat yang tidak bertanggung jawab akan keselamatan PMI. Salah satu faktor masih banyaknya PMI yang memilih jalur non-prosedural adalah minimnya pemahaman masyarakat akan prosedur-prosedur yang aman bagi seseorang untuk menjadi PMI.⁶

Kembali ke dalam konteks kewilayahan, Kabupaten Sukabumi adalah salah satu wilayah yang mengalami permasalahan PMI, khususnya non-prosedural. Mengutip dari wawancara dengan ketua SBMI Kabupaten Sukabumi, terungkap bahwa ada beberapa alasan mengapa masalah tersebut bisa muncul. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan ekonomi pribadi/keluarga dari para calon PMI, keterbatasan lapangan pekerjaan yang layak serta mudah diakses di wilayah domisili, tekanan sosial dan budaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga, kurangnya pengetahuan para calon PMI tentang proses menjadi PMI, birokrasi yang rumit untuk menjadi PMI legal yang mengecilkan hati calon PMI untuk mengambil opsi PMI legal, serta jaringan calo yang aktif merekrut calon PMI untuk berangkat secara non-prosedural.

Dampak dari rangkaian penyebab ini pun dapat dilihat dalam tiap tingkatan sosial. Mengutip kembali dari ketua SBMI Kabupaten Sukabumi, pada level individu PMI beberapa resikonya adalah

⁵ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024a. *Dashboard Statistik Pekerja Migran Indonesia*. Statistik Pekerja Migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>.

⁶ M. Yusuf Samad et al., "Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 4 (December 27, 2023): 260–72, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>.

risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih besar dalam mekanisme non-prosedural karena minimnya perlindungan. Kedua, risiko pelanggaran hak asasi dan hak pribadi sebagai pekerjaannya dapat dilanggar dengan penundaan/pembatalan gaji/upah, penahanan ilegal, penyitaan dokumen, hingga pembatasan akses kesehatan dan/atau bantuan hukum, bahkan kehilangan nyawa. Selanjutnya, pada tingkat komunal, misal keluarga, mengingat kebanyakan PMI non-prosedural adalah perempuan, ini dapat menyebabkan perubahan struktur dan dinamika keluarga dimana harus ada adaptasi dalam keluarga, contohnya terkait pengasuhan anak. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan PMI non-prosedural ini dapat mengalami isolasi sosial karena koneksi jaringan sosialnya terputus atau terganggu karena simpul sosialnya disediakan anggota keluarga yang menjadi PMI. Efeknya, terkadang keluarga dapat terdampak keharmonisannya, kesehatan mentalnya, dan tingkat stresnya. Terakhir, di tingkat nasional/negara, PMI non-prosedural tidak berkontribusi secara resmi pada perekonomian melalui pajak atau remitansi resmi. Sehingga, penerimaan negara akan terpengaruh negatif jika semakin banyak fenomena PMI non-prosedural yang terjadi.

Mitra kerjasama HI UNPAR adalah SBMI serta IOM. SBMI merupakan organisasi nirlaba yang berdiri pada 25 Februari 2003. SBMI berorientasi untuk melindungi segenap hak PMI yang sedang mempersiapkan diri, bekerja di luar negeri, atau yang sudah kembali ke tanah air. Sementara itu, IOM adalah organisasi internasional yang beroperasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjawab kebutuhan mendasar para migran. IOM didirikan pada tahun 1951, beranggotakan 175 negara dan bertanggungjawab untuk manajemen migrasi. IOM bertugas untuk memberikan layanan langsung dan memastikan hak-hak dasar migran tidak terganggu. Lebih dari itu, IOM juga bertugas untuk memberikan diseminasi dengan menyediakan wadah kerjasama antara masyarakat sipil, pemerintah, dan pekerja migran. Sementara itu, Yayasan AKATIGA adalah mitra yang berfokus dalam pembangunan kawasan perdesaan. Dalam konteks ini, yayasan ini berdiri pada tahun 1991 dan bertugas dalam ikhwal pemberian *capacity-building* pemuda/i serta melakukan pendampingan kelompok masyarakat lokal untuk mendapatkan akses dan kualitas kesehatan yang mumpuni bagi masyarakat miskin. Dua program yang dimaksud adalah *Let's Be Young Farmer* (LBYPF) dan Program Perempuan Kawal Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

PMI non-prosedural adalah isu penting di Jawa Barat. Tingginya jumlah pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi menyebabkan berbagai permasalahan, termasuk kerentanan terhadap eksploitasi, ketidakjelasan status hukum, dan sulitnya akses perlindungan. Oleh karena itu, upaya penanganan dan pencegahan PMI non-prosedural menjadi salah satu prioritas di wilayah ini. Lebih lanjut lagi, ini sejalan dengan hasil asesmen awal dan komunikasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) serta *International Organization for Migration* (IOM) dan Yayasan AKATIGA. Berdasarkan wawancara dengan Jejen Nurjanah dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Sukabumi pada 7 September 2024, Kabupaten Sukabumi dicatat sebagai salah satu

wilayah dengan permasalahan PMI non-prosedural yang signifikan. Keterlibatan para mitra didasarkan pada permasalahan spesifik yang mereka hadapi di lapangan. SBMI Kabupaten Sukabumi selama ini menghadapi kesulitan dalam menjangkau calon PMI di desa-desa yang rawan migrasi non-prosedural karena keterbatasan sumber daya dan akses informasi. Yayasan AKATIGA, sebagai lembaga riset sosial, mencatat perlunya pendekatan yang lebih tepat sasaran berdasarkan konteks lokal yang kompleks, namun masih minim data lapangan yang komprehensif. Sementara itu, IOM Indonesia menyoroti tantangan dalam memastikan bahwa materi edukasi migrasi aman dapat tersampaikan secara efektif di tingkat komunitas, khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan dan keluarga berpenghasilan rendah. Permasalahan-permasalahan inilah yang menjadi dasar pembentukan kerja sama lintas lembaga dalam program ini, dengan UNPAR berperan sebagai fasilitator, penyedia pendekatan edukatif, dan penghubung antara kebutuhan mitra dan solusi lapangan.

Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat Program Studi Hubungan Internasional UNPAR merancang program pengabdian masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk membangun kesadaran dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai migrasi aman. Tujuan ini dicapai dengan melakukan sosialisasi dan diskusi tema-tema seperti informasi umum tentang PMI, pengenalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), identifikasi perekrut (PMI) yang bertanggung jawab, serta pengenalan (Serikat Buruh Migran Indonesia) SBMI serta mekanisme pelaporan masalah PMI.

2. METODOLOGI

Migrasi non-prosedural mengacu pada proses perpindahan tenaga kerja ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. PMI non-prosedural sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi, termasuk eksploitasi, kerja paksa, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena kurangnya perlindungan hukum dan akses terhadap bantuan resmi. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai migrasi aman dan prosedural.

Target peserta dari kegiatan ini adalah warga Kabupaten Sukabumi yang merupakan calon PMI, pasangan/keluarga calon PMI, aparat desa, tokoh masyarakat dan agama. Selain itu, kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan lain seperti Yayasan Akatiga (Bandung), SBMI Kabupaten Sukabumi, dan IOM Indonesia. Target peserta dari kegiatan ini mencakup berbagai pihak yang berperan dalam proses migrasi tenaga kerja. Warga Kabupaten Sukabumi yang merupakan calon PMI menjadi sasaran utama karena daerah ini memiliki angka PMI non-prosedural yang tinggi. Selain itu, pasangan atau keluarga calon PMI juga dilibatkan karena mereka berperan dalam pengambilan

keputusan dan dapat menjadi agen perlindungan bagi anggota keluarga yang akan bekerja di luar negeri. Aparatur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga menjadi target karena mereka memiliki pengaruh besar dalam memberikan informasi serta membentuk persepsi masyarakat terkait migrasi.

Metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup sesi diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Yayasan Akatiga (Bandung), SBMI Kabupaten Sukabumi, IOM Indonesia, UN Women, dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pendekatan berbasis komunitas, memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan perspektif akademis, advokasi, dan kebijakan dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam lima sesi utama:

1. Informasi Umum Mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Sesi pertama bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai status dan peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perekonomian keluarga dan negara. Dalam sesi ini, peserta diberikan informasi tentang besarnya kontribusi remitansi dari PMI yang telah meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia serta peringkat Indonesia sebagai salah satu negara penerima remitansi terbesar di dunia. Sesi ini juga membahas prosedur dasar menjadi PMI, seperti persyaratan administratif, pelatihan yang diperlukan, dan peran lembaga terkait, termasuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pengetahuan ini diharapkan dapat membekali peserta dengan pemahaman dasar mengenai pentingnya migrasi prosedural (lihat gambar 1).



Gambar 1. Pemaparan pembicara di sesi 1 tentang pengenalan PMI.

2. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Sesi kedua menitikberatkan pada pengenalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap kali menjadikan PMI sebagai sasaran karena kerentanannya. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan dengan definisi TPPO, bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi (seperti perbudakan, perdagangan anak, eksploitasi seksual, dan kerja paksa), aktor-aktor yang mungkin terlibat, serta modus-modus perekrutan ilegal yang sering digunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peserta juga diberikan informasi tentang dampak jangka panjang dari TPPO, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan memahami ancaman TPPO, peserta diharapkan mampu lebih waspada dan terhindar dari risiko yang sering dihadapi oleh PMI non-prosedural. (lihat gambar 2).



Gambar 2. Pemaparan sesi gambaran umum TPPO.

3. Cara Mengenali Ciri-Ciri Perekrut yang Bertanggung Jawab

Sesi ini bertujuan memberikan keterampilan praktis untuk mengenali perekrut atau agen yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Peserta belajar mengenai kriteria utama agen atau perekrut yang resmi, seperti kepemilikan izin dari instansi terkait, transparansi dalam proses perekrutan, serta kewajiban memberikan informasi lengkap tentang kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan potensi risiko. Di samping itu, peserta juga diajarkan cara mengecek legalitas agen perekrut dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda perekrutan yang mencurigakan, seperti janji penghasilan berlebih tanpa kejelasan kontrak kerja atau permintaan dokumen tanpa bukti tertulis. Pengetahuan ini akan membantu calon PMI untuk

menghindari perekrut yang berpotensi melakukan praktik ilegal atau eksploitatif. Peserta juga diberikan informasi mengenai tugas serta tanggung jawab pemerintah di berbagai lapisan dari pusat hingga lokal untuk perekrutan PMI. (lihat gambar 3).



Gambar 3. Pembekalan kemampuan mengenali agen resmi kepada peserta.

4. Peran SBMI dan Mekanisme Pelaporan

Sesi terakhir berfokus pada peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan pentingnya mekanisme pelaporan bagi perlindungan PMI. Peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi SBMI sebagai organisasi yang mendampingi PMI dalam berbagai aspek, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pemulangan. SBMI juga menjadi tempat bagi PMI yang membutuhkan bantuan dalam situasi darurat, seperti menghadapi kekerasan atau penipuan di negara tujuan. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan dengan prosedur pelaporan jika mengalami atau mengetahui kasus TPPO atau eksploitasi terhadap PMI, baik melalui SBMI maupun lembaga lainnya. Ditekankan pula pentingnya kesadaran komunitas dalam mendukung dan melaporkan jika ada indikasi TPPO untuk melindungi keselamatan PMI dan masyarakat pada umumnya. (lihat gambar 4).



Gambar 4. Pemaparan fungsi SBMI serta tugas dan tanggung jawabnya.

5. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dalam dua tahap untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi pertama diadakan pada 12 Oktober 2024 melalui survei kepuasan kepada peserta, yang memberikan gambaran tentang respon dan manfaat sosialisasi. Evaluasi kedua dilakukan oleh tim pada 26 Oktober 2024 sebagai refleksi atas proses dan hasil kegiatan ini. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dan mengembangkan rekomendasi untuk program pengabdian berikutnya, agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. (lihat gambar 5-8).



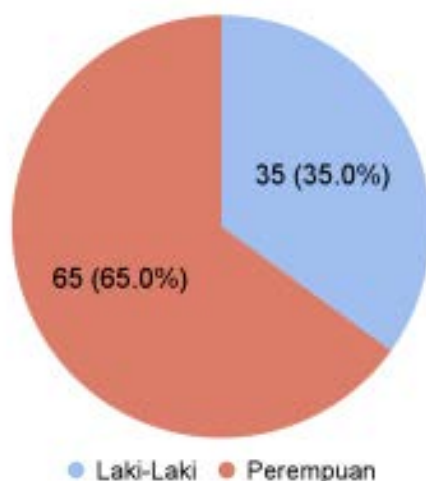


Gambar 5-8. Sesi Evaluasi dan Penilaian Sosialisasi Bersama para Peserta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian dari Program Studi Hubungan Internasional UNPAR berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Dalam lima sesi utama yang diselenggarakan, anggota tim bertindak sebagai narasumber dan fasilitator, menyampaikan materi sesuai topik yang telah disusun secara kolaboratif dengan mitra. Selain itu, tim juga menyusun dan mendistribusikan angket evaluasi kepada peserta, serta melakukan pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dari hasil tanggapan tersebut. Analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi program lanjutan. Tidak hanya itu, tim turut menyusun laporan program, modul edukasi, serta naskah akademik yang menjadi luaran penting untuk diseminasi hasil kegiatan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas. Sosialisasi ini menghasilkan empat dampak utama yang signifikan bagi masyarakat di empat desa target di Kabupaten Sukabumi. Pertama, Partisipasi Aktif dan Respons Masyarakat. Sosialisasi ini menarik partisipasi yang signifikan dari 93 warga desa di empat desa target migrasi non-prosedural di Kabupaten Sukabumi (Sindangsari, Sudajayahilir, Cikaret, dan Sasagaran). Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan wawasan komprehensif tentang migrasi aman, termasuk prosedur migrasi legal, risiko migrasi non-prosedural, dan cara mengenali ciri-ciri perekrut yang bertanggung jawab. Informasi yang diberikan diharapkan membantu peserta lebih waspada terhadap risiko jaringan perdagangan manusia yang sering kali membungkus dirinya dalam tawaran kerja di luar negeri. Dari

jumlah peserta, 65% adalah perempuan (lihat Gambar 9), kelompok yang lebih rentan menjadi target perdagangan manusia dan eksploitasi. Keterlibatan perempuan dalam sosialisasi ini sangat penting, karena mereka sering kali tidak memiliki akses ke informasi yang memadai. Dengan bekal yang mereka peroleh, para perempuan ini diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih aman mengenai migrasi, mengurangi risiko menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia, serta menjadi agen penyebar informasi bagi anggota komunitas lainnya



Gambar 9. Komposisi Peserta Sosialisasi.

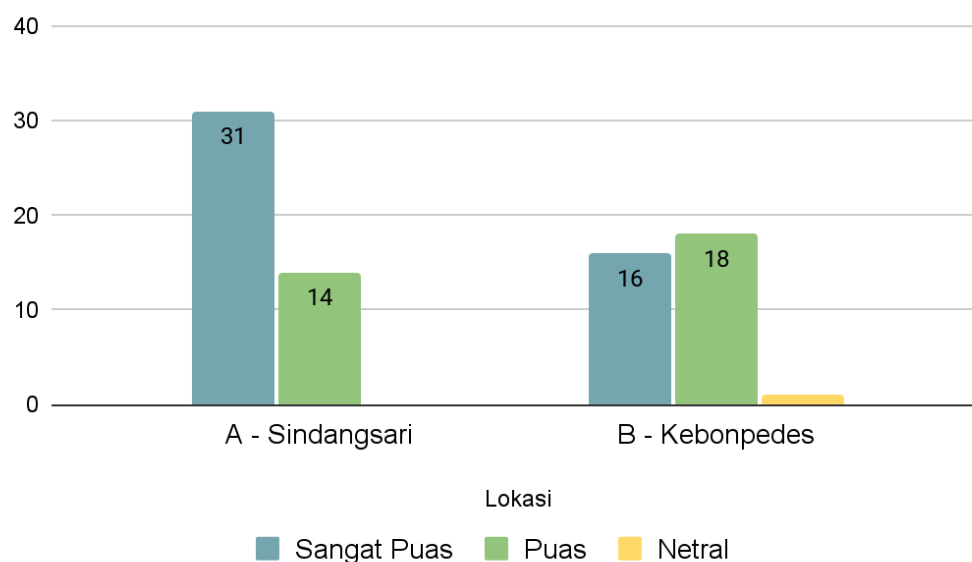
Lebih jauh, partisipasi aktif ini mencerminkan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya migrasi yang aman. Dalam diskusi kelompok, peserta saling berbagi pengalaman dan strategi, menciptakan atmosfer solidaritas yang memperkuat jaringan perlindungan komunitas. Selain itu, mereka juga mulai mengenali pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam mendukung anggota yang berniat bekerja ke luar negeri, memastikan bahwa mereka memiliki dukungan moral dan informasi yang memadai untuk menghindari jebakan eksploitasi.

Kehadiran perempuan dalam jumlah yang signifikan juga mendorong dialog yang lebih inklusif mengenai isu-isu gender terkait migrasi. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi perempuan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka dan membangun kepercayaan diri dalam mengambil keputusan penting. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan sebagai pemimpin komunitas dalam upaya pencegahan perdagangan manusia dan perlindungan anggota komunitas lainnya.

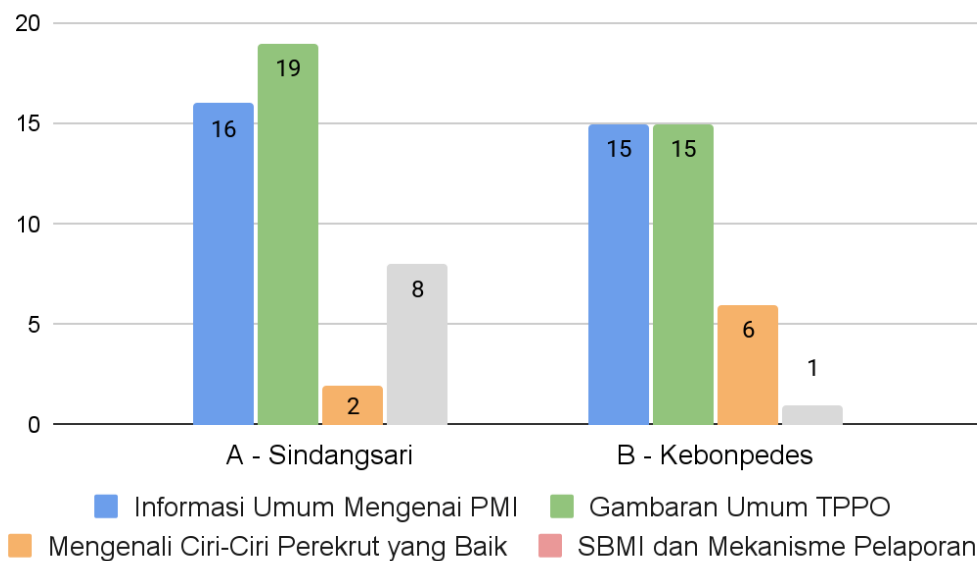
Kedua, **Dampak Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat.** Dampak edukasi terlihat dari pemahaman yang meningkat di kalangan peserta mengenai prosedur migrasi aman, termasuk aspek hukum dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan migrasi yang sah dan terlindungi. Sesi-sesi sosialisasi ini mengungkapkan berbagai bentuk risiko yang mengancam calon PMI, terutama mereka yang direkrut melalui jalur ilegal. Diharapkan, informasi ini mampu

memperkecil peluang jaringan perdagangan manusia memanipulasi warga desa yang sering kali tidak mengetahui proses migrasi yang aman. Evaluasi yang dilakukan selama dan setelah acara menunjukkan bahwa 59% peserta merasa sangat puas dan 40% merasa puas dengan kegiatan ini (lihat gambar 10). Materi tentang peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan topik tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi yang paling berkesan bagi peserta, dengan masing-masing sebanyak 31 dan 34 suara peserta (peserta dapat memilih lebih dari satu) menyatakan materi tersebut sangat relevan (lihat gambar 11).

Selain itu, materi edukasi yang diberikan membantu peserta memahami pentingnya mematuhi prosedur hukum dalam proses migrasi, seperti memiliki dokumen yang sah dan mengetahui jalur legal yang tersedia. Sosialisasi ini juga menekankan pada pengenalan ciri-ciri perekrut yang bertanggung jawab dan aman, serta tanda-tanda perekrut ilegal yang sering kali memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Dengan pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat dan terlindungi, serta terhindar dari eksploitasi. Lebih lanjut, peningkatan kesadaran ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka, menyebarluaskan informasi yang mereka peroleh kepada orang lain. Sosialisasi ini menciptakan efek berantai di mana informasi penting mengenai migrasi aman dapat menjangkau lebih banyak individu, memperkuat upaya kolektif dalam melawan praktik perdagangan manusia dan migrasi ilegal.



Gambar 10. Persentase Tingkat Kepuasan Peserta Sosialisasi



Gambar 11. Sesi/Materi yang Berkesan

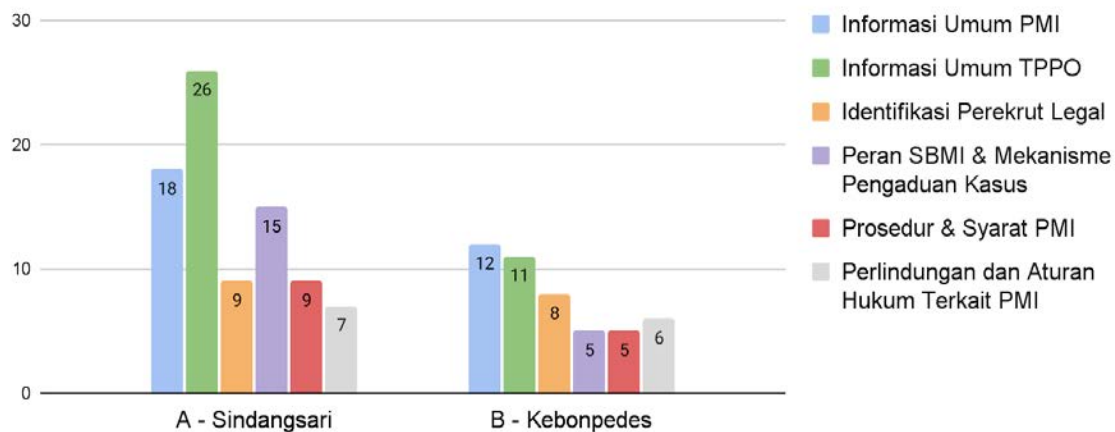
Ketiga, **Dukungan dan Peran Aktif Aparat Desa dan Kecamatan.** Program sosialisasi ini mendapat dukungan penuh dari aparat desa dan kecamatan yang kini memiliki pemahaman lebih baik tentang prosedur migrasi aman. Peran aparat desa sangat strategis, terutama karena mereka adalah garda terdepan yang sering kali pertama kali dihubungi warga ketika mencari informasi tentang pekerjaan di luar negeri. Aparat desa yang teredukasi tentang migrasi aman dapat membantu warga; Mengarahkan mereka ke jalur migrasi yang resmi dan prosedural, serta memberikan pengetahuan yang benar tentang bahaya migrasi non-prosedural.

Dengan pemahaman ini, aparat desa dapat berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya di komunitas mereka, memberikan dukungan langsung kepada warga yang membutuhkan nasihat atau menghadapi situasi yang mencurigakan terkait migrasi. Lebih dari itu, aparat desa dan kecamatan memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan melaporkan praktik ilegal yang mungkin terjadi di lingkungan mereka. Mereka dapat menjadi kontak pertama bagi warga yang ingin melaporkan indikasi perdagangan manusia atau praktik migrasi ilegal, serta memfasilitasi upaya penanganan awal sebelum melibatkan pihak berwenang yang lebih tinggi.

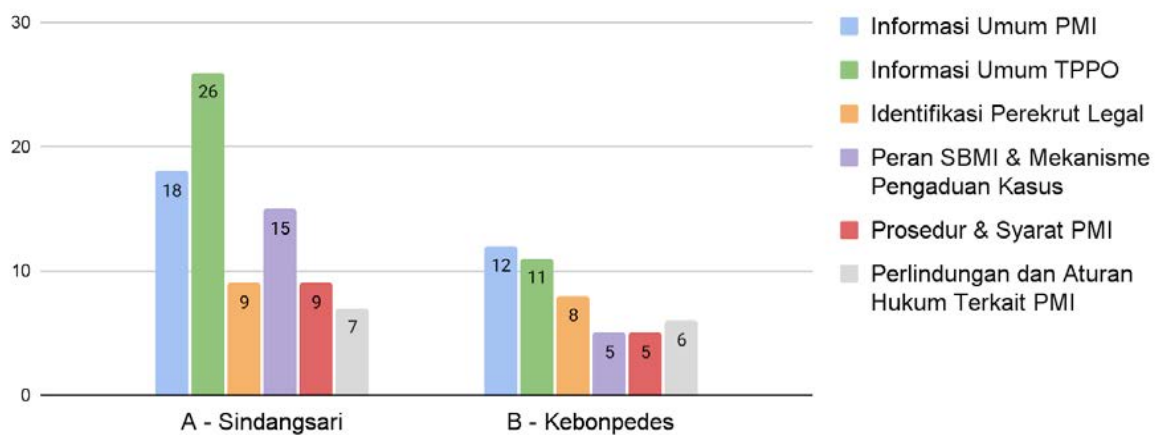
Aparat desa juga memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang lebih luas di komunitas mereka. Melalui jaringan desa, mereka dapat menyampaikan materi sosialisasi kepada lebih banyak anggota masyarakat, tidak hanya terbatas pada peserta yang hadir dalam sesi edukasi. Ini memungkinkan edukasi tentang migrasi aman untuk menjangkau lebih banyak orang, memperkuat perlindungan komunitas secara keseluruhan. Dengan dukungan dan peran aktif aparat desa dan kecamatan, program ini menciptakan lingkungan yang lebih waspada dan siap dalam menghadapi tantangan migrasi non-prosedural dan perdagangan manusia.

Keempat, **Penerapan Model Kerja Sama Antarlembaga untuk Penguatan Program Keberlanjutan**. Program ini menunjukkan efektivitas model kerja sama yang melibatkan tiga lembaga utama, yaitu International Organization for Migration (IOM), Program Studi Hubungan Internasional UNPAR, dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Kolaborasi ini memungkinkan setiap lembaga memainkan peran khusus dalam menciptakan pendekatan holistik yang mendukung keberlanjutan perlindungan bagi calon PMI:

1. **IOM (International Organization for Migration)** menyediakan panduan dan praktik internasional dalam tata kelola migrasi yang aman. Mereka memastikan bahwa sosialisasi ini mengikuti standar internasional dalam melindungi calon pekerja migran dari perdagangan orang dan eksploitasi. Dengan keahlian mereka, IOM membantu memastikan bahwa informasi yang diberikan mencakup aspek-aspek penting dari perlindungan migran, dari prosedur hukum hingga mekanisme pencegahan eksploitasi.
2. **Program Studi Hubungan Internasional UNPAR** berperan sebagai jembatan komunikasi yang menyederhanakan materi migrasi yang kompleks menjadi informasi yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks masyarakat desa. Melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas, UNPAR memastikan bahwa peserta sosialisasi dapat dengan mudah memahami dan menerapkan informasi yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan ini juga membantu membangun kesadaran kritis di kalangan masyarakat desa mengenai pentingnya migrasi yang aman dan prosedural.
3. **SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia)**, sebagai organisasi yang terlibat langsung dengan masyarakat migran, berperan sebagai pendamping aktif yang memberikan dukungan, pemantauan, dan tindakan pencegahan di lapangan. Peran SBMI sangat vital dalam membantu warga mengenali jalur migrasi yang legal dan dalam menyediakan saluran pelaporan bagi mereka yang menghadapi masalah saat berada di luar negeri. Dengan pengalaman langsung mereka, SBMI memberikan dimensi praktis dalam mendukung dan melindungi hak-hak pekerja migran.
4. **Yayasan AKATIGA menjadi teman diskusi dan konsultasi asesmen awal (pemetaan awal) dan hasil pelaksanaan**. Dengan keahlian mereka dalam penelitian sosial, AKATIGA membantu tim memahami konteks sosial-ekonomi warga, sehingga strategi pelaksanaan sosialisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik komunitas target. Masukan dari AKATIGA membantu meningkatkan efektivitas sosialisasi, memastikan bahwa program ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam perlindungan diri mereka.



Model kolaboratif ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antarlembaga dapat memperkuat program keberlanjutan dengan menggabungkan keahlian, pengalaman lapangan, dan pendekatan berbasis komunitas untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam perlindungan pekerja migran. Model ini tentunya juga memperkuat dukungan pada setiap tahap migrasi, mulai dari edukasi hingga pelaporan dan pendampingan. Dengan adanya model kerja sama ini, diharapkan komunitas di Sukabumi dapat memanfaatkan jaringan perlindungan yang lebih luas dan efektif, mengurangi risiko migrasi non-prosedural, serta membuka jalan menuju migrasi yang aman dan prosedural bagi seluruh warga yang membutuhkan. Hasil evaluasi peserta menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi atas acara sosialisasi dan informasi yang disampaikan, dengan pola respons positif yang konsisten di setiap desa. Secara keseluruhan, 59% peserta menyatakan sangat puas dan 40% merasa puas dengan pelaksanaan sosialisasi ini (lihat gambar 10). Sesi yang paling relevan bagi peserta adalah materi tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan 31 suara memberikan perhatian khusus, serta materi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau migrasi non-prosedural yang menarik perhatian 34 suara peserta (lihat gambar 11). Lebih lanjut, para peserta menyebutkan bahwa informasi mengenai prosedur legal PMI (30 suara), TPPO (37 suara), cara mengenali agen atau perekrut yang aman dan legal (17 suara), serta peran SBMI dalam menerima pengaduan kasus (20 suara), merupakan informasi baru yang sangat bermanfaat bagi mereka (lihat gambar 12). Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya memenuhi harapan peserta tetapi juga berhasil menyampaikan materi yang relevan dan berdampak dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang migrasi yang aman dan mekanisme perlindungan yang tersedia.



Gambar 12. Pengetahuan Baru yang Bermanfaat

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif untuk membantu mitra dalam mengatasi persoalan migrasi non-prosedural. Pendekatan ini melibatkan kerja sama erat antara tim, mitra di desa, serta organisasi internasional dan lokal seperti IOM dan SBMI, guna menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan desa agar terhindar dari migrasi ilegal. Melalui upaya bersama, kegiatan ini mampu menjangkau masyarakat secara langsung dan memberikan informasi yang relevan untuk mencegah terjadinya migrasi non-prosedural. Pendekatan ini juga bertujuan agar program lebih mudah diterima dan diaplikasikan oleh mitra, dengan menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan memberdayakan peran perempuan dalam menjaga keamanan sosial di desa.

Dampak positif dari program ini dirasakan oleh mitra dan para peserta, terutama dalam membangun jejaring antar perempuan di desa serta koneksi dengan IOM dan SBMI yang aktif dalam mendukung program ini. Para peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tanda-tanda dan risiko migrasi non-prosedural, termasuk cara mengenali agen migrasi ilegal yang sering kali beroperasi tanpa izin. Adanya jejaring yang kuat memungkinkan para perempuan di desa untuk saling mendukung dan bertukar informasi, sehingga menguatkan pemahaman bersama tentang pentingnya migrasi yang aman dan teratur. Tidak hanya peserta, pemerintah desa pun menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya isu ini, yang secara tidak langsung memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melindungi komunitas dari bahaya migrasi non-prosedural.

Berdasarkan evaluasi, peserta memberikan beberapa rekomendasi penting agar program sosialisasi abdimas ini berkontribusi pada masalah pengurangan migrasi non prosedural. Mereka mengusulkan agar sosialisasi ini ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih mendalam, termasuk:

1. Materi Lanjutan tentang TPPO dan Perekrut Legal

Peserta merekomendasikan penyediaan materi yang lebih mendalam mengenai modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta bagaimana mengenali perekrut legal. Pengetahuan ini penting agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi risiko dan lebih teliti dalam memilih agen perekrut yang bertanggung jawab.

2. Materi Lanjutan tentang Kondisi PMI di Negara Tujuan

Banyak peserta menyarankan agar diberikan informasi lanjutan mengenai kondisi kerja dan hak-hak PMI di negara tujuan. Materi ini bertujuan untuk memberi calon PMI pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan tantangan yang mungkin mereka hadapi saat bekerja di luar negeri, serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dan hak-hak mereka.

3. Sosialisasi Berkala

Agar pemahaman mengenai migrasi aman terus meningkat dan tetap relevan, peserta mengusulkan agar sosialisasi dilakukan secara berkala. Program ini diharapkan tidak hanya mencakup sosialisasi awal, tetapi juga penyuluhan berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran warga terhadap bahaya migrasi non-prosedural dan perlunya mengikuti prosedur yang sah.

4. Kerja Sama dengan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Untuk memperluas cakupan dan efektivitas program, peserta merekomendasikan kerja sama lebih intensif dengan pemerintah, aparat desa, lembaga pendidikan, serta organisasi terkait lainnya. Kolaborasi ini akan mempermudah akses informasi dan menambah kredibilitas sosialisasi sehingga dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

5. Perluasan Sosialisasi ke Daerah dan Tempat Lain

Peserta juga menyarankan agar sosialisasi tidak hanya dilakukan di desa-desa yang mudah dijangkau, tetapi juga diperluas ke daerah terpencil atau ke tempat-tempat strategis seperti sekolah dan kampus. Ini akan membantu menjangkau kelompok yang lebih muda dan masyarakat yang mungkin sulit diakses, sehingga kesadaran akan pentingnya migrasi aman dapat ditanamkan sejak dini.

6. Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi dengan Bantuan Modal

Mengingat bahwa banyak peserta terdorong bermigrasi karena kebutuhan ekonomi, mereka merekomendasikan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, disertai dengan bantuan modal usaha. Kegiatan ini dapat menjadi alternatif bagi warga yang mempertimbangkan migrasi, membantu mereka menciptakan sumber penghasilan yang layak di dalam negeri sehingga tidak merasa harus bermigrasi tanpa prosedur resmi.

Rekomendasi-rekomendasi ini menggambarkan kebutuhan masyarakat untuk tidak hanya diberikan pemahaman awal, tetapi juga pendampingan berkelanjutan dan peluang ekonomi alternatif di tingkat lokal. Hal ini memperlihatkan kesadaran peserta tentang pentingnya sosialisasi migrasi

aman serta keterlibatan multi-pihak untuk menciptakan perlindungan yang lebih komprehensif bagi calon PMI di masa mendatang. Sebagai bagian dari luaran program, tim pengabdian masyarakat tengah mempersiapkan manuskrip dan modul yang nantinya diharapkan dapat diterbitkan dalam jurnal pengabdian masyarakat. Publikasi ini diharapkan menjadi sumber referensi yang bermanfaat, baik untuk praktisi maupun masyarakat yang ingin memahami lebih dalam mengenai cara pencegahan migrasi non-prosedural. Proses penulisan ini tidak hanya mendokumentasikan hasil kegiatan tetapi juga memperkuat posisi program dalam mendukung pendidikan berkelanjutan. Dengan adanya modul dan manuskrip, program ini diharapkan dapat dijadikan panduan praktis dan akademik bagi komunitas atau organisasi lain yang memiliki tujuan serupa dalam memerangi migrasi ilegal.

Keberhasilan dari program pengabdian masyarakat ini terletak pada pendekatan dua arah yang menjaga keterlibatan aktif dari mitra, sehingga solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara top-down, program ini juga menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi, yang menciptakan rasa memiliki bagi mitra. Ke depannya, baik tim maupun mitra berharap bahwa program ini dapat dilanjutkan dengan materi yang lebih mendalam dan bersifat teknis, sehingga dampak yang dirasakan dapat lebih optimal dan bertahan lama. Harapan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat upaya pencegahan migrasi non-prosedural melalui pengetahuan yang berkelanjutan dan inovatif, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Program Pengabdian Masyarakat ini didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, dengan nomor kontrak sebagai berikut: III/LPPM/2024-08/53-PMP.

6. REFERENSI

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024a. Dashboard statistik pekerja migran Indonesia [Data dashboard]. <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 2024b. Kepala BP2MI: Sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia meningkat pesat. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-sumbangan-devisa-dari-pekerja-migran-indonesia-meningkat-pesat>

Berhané, Y. 2024. Enhancing social protection for migrant workers: Challenges and strategies in the East and Horn of Africa. International Labour Organization.

<https://www.ilo.org/resource/article/enhancing-social-protection-migrant-workers-challenges-and-strategies-east>

Samad, M. Y., Amanda, N., Manggabarani, M. T. C., Wastitya, N., Aziz, A., Maya, H.B. 2023. *Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) melalui Pendekatan Intelijen Strategis. Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 260–272. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.486>

UN Global Compact. (n.d.). Migrant workers. Business & Human Rights Navigator. Disadur pada 8 Januari 2025 dari <https://bhr-navigator.unglobalcompact.org/issues/migrant-workers/>